

## KEMAMPUAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEMODERASI PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN

Ni Ketut Anindya Permatasari<sup>1</sup>  
A.A.N.B. Dwirandra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: [permatiaanin05@yahoo.com](mailto:permatiaanin05@yahoo.com)/ telp: 085339879888

### ABSTRAK

Kinerja keuangan daerah diduga tidak linier pengaruhnya pada tingkat kemiskinan karena adanya faktor-faktor kontijensi yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pada tingkat kemiskinan serta kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi kinerja keuangan pada tingkat kemiskinan. Penelitian dengan lingkup 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013 menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data sekunder dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik. Data telah diuji dan memenuhi uji asumsi klasik serta uji kesesuaian model dengan  $adjusted R^2 = 43,2\%$ , selanjutnya dilakukan uji hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan teknik *Moderated Regression Analysis*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan, rasio efisiensi, rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi kinerja keuangan pada tingkat kemiskinan.

**Kata kunci** : kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan

### ABSTRACT

*The financial performance of allegedly non-linear effect on the level of poverty due to contingent factors, one of which is economic growth. This study aims to determine the effect of financial performance on poverty levels and the ability of financial performance moderating economic growth on poverty levels. Research by the scope of the 8 counties and one city in the province of Bali in 2009-2013 using quantitative and qualitative data with secondary data sources from Bali Provincial Finance Bureau and the Central Bureau of Statistics. Data has been tested and meets the classic assumption test and conformance test models with adjusted R2 = 43.2%, further research hypothesis testing using multiple linear regression analysis techniques and techniques Moderated Regression Analysis. The test results showed that the financial performance areas such as self-sufficiency ratio of the negative impact on poverty levels, the ratio of efficiency, effectiveness ratio and the ratio of revenue growth had no effect on levels of poverty, negatively affects economic growth on poverty levels. Economic growth was not able to moderate the financial performance on poverty levels.*

**Keywords** : financial performance , economic growth, poverty

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi topik yang penting untuk diteliti. Hal ini tak lepas dari masih relatif besarnya angka kemiskinan yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang. Salah satu upaya pemerintah telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan meletakkan dasar otonomi daerah yang lebih luas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pratomo (2015) menyatakan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Desentralisasi fiskal telah memberikan daerah kewenangan yang besar dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih mandiri. Sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*), legislatif sebagai wakil rakyat berperan sebagai prinsipal (pihak yang memberi wewenang) dan eksekutif berperan sebagai agen (pihak yang melakukan tindakan sesuai dengan wewenang atau kehendak prinsipal).

Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Majunya sektor pariwisata di Provinsi Bali tidak serta merta menghapuskan penduduk miskin di Bali. Nurdin (2010) menyatakan Fenomena yang sering terjadi adalah pendapatan ekonomi tinggi, investasi tinggi dan belanja pemerintah juga tinggi, akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, terlihat dari angka kemiskinan yang tetap tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan

sejauh mana implementasi pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan.

BPS Provinsi Bali menyatakan Pemerintah Provinsi Bali menetapkan pengurangan jumlah penduduk miskin sebagai prioritas utama dalam pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 - 2013, yang ditargetkan menurun menjadi 174.510 orang atau setara dengan 4,38 persen dari total penduduk Bali. Namun berdasarkan penghitungan kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2009 - 2013 penurunan angka kemiskinan tidak terjadi secara linier berkelanjutan. Belum tercapainya target pemerintah ini berimplikasi bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan sampai saat ini belum sepenuhnya berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin untuk keluar dari jurang kemiskinan.

Tingkat kemampuan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Namun pada kenyataannya dengan PAD yang tinggi tersebut tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Pendapatan daerah tidak selalu mengurangi tingkat kemiskinan karena adanya belanja rutin daerah yang bisa saja cukup besar menyedot pendapatan daerah, sehingga menimbulkan sedikitnya penyaluran dana untuk daerah-daerah yang masih kekurangan bantuan dari pemerintah. Sidik (2000) menekankan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam menanggulangi

kemiskinan.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Hamzah, 2008). Ukuran untuk menilai kinerja keuangan daerah dalam organisasi pemerintah terdiri dari beberapa rasio yaitu; rasio kemandirian untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah; rasio efisiensi untuk mengukur tingkat keefisienan dalam merealisasikan pendapatan daerah; dan pertumbuhan pendapatan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkat kinerja selanjutnya (Halim, 2007:232).

Penelitian sejenis seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri Ani (2012) Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Niken Ning (2015), kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kemandirian daerah dan keserasian belanja modal berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan, efektivitas PAD berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan dan efisiensi keuangan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui adanya inkonsisten dari beberapa penelitian, sehingga menurut Govindarajan (1998) diperlukan upaya

untuk merekonsiliasi ketidakkonsistenan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor kondisional antara kedua variabel dengan pendekatan kontinjensi. Salah satu variabel yang dapat menjadi factor kondisional dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah pemerintah belum mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi dapat pula dinikmati oleh masyarakat sampai yang paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah (Hamzah, 2008). Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan pembangunan dan familiar bagi masyarakat umum. Pertumbuhan ekonomi berarti adanya kenaikan pendapatan dari daerahnya itu sendiri tanpa memandang kenaikan itu besar atau kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai seberapa besar pengaruh linier kinerja keuangan daerah pada tingkat kemiskinan dan untuk mengukur faktor kondisional lain berupa pertumbuhan ekonomi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini bermaksud untuk mereplikasi dan mengeksplorasi penelitian yang dilakukan oleh Putri Ani (2012) yang meneliti pengaruh kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Bali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel pertumbuhan ekonomi daerah sebagai faktor

kondisional yaitu sebagai variabel pemoderasi.

Putri Ani (2014) dan Niken (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap kemiskinan dengan pola hubungan yang negatif, hal ini dapat dijelaskan karena dana perimbangan yang merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak semuanya dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan. Sholikhah (2011), Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi (*growth*), artinya semakin tinggi tingkat kemampuan keuangan daerah tidak akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemandirian Daerah berpengaruh positif dan signifikan, artinya semakin tinggi rasio kemandirian daerahnya maka akan menambah tingkat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah Kinerja Keuangan berupa: rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektifitas PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali? 2) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali? 3) Apakah Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan berupa: rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektifitas PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali?

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan berupa: rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektifitas PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali? 2) Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat pada Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali? 3) Untuk mengetahui kemampuan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektifitas PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang akuntansi sektor publik mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Tingkat Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Bali. Di samping itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali akan pentingnya peningkatan kinerja keuangan daerah dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing.

Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2002). Putri Ani (2014) dan Niken (2015) dalam penelitiannya menunjukkan

bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap kemiskinan dengan pola hubungan yang negatif, hal ini dapat dijelaskan karena dana perimbangan yang merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak semuanya dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah diterima oleh Kabupaten dan Kota cukup besar, karena DAU berasal dari Pendapatan Netto Dalam Negeri yang diberikan kepada daerah sesuai dengan celah fiskal dan alokasi dasar. Perhitungan celah fiskal memperhitungkan jumlah penduduk, luas wilayah, IPM dan PDRB sedangkan perhitungan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa alokasi DAU secara prioritas dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai.

Yuana (2014) menyatakan Rasio efektivitas merupakan rasio derajat keberhasilan yang akan didapat dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Apabila daerah tersebut mampu merealisasikan peningkatan PAD dengan pelayanan masyarakat yang optimal maka rasio efektivitas akan tinggi. Derajat keberhasilan suatu daerah dalam mengelola anggaran maupun mengelola potensi yang terdapat didaerah tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan perekonomian didaerah itu, semakin berhasil dalam mencapai target yang diinginkan atau semakin efektif, maka seharusnya perkembangan perekonomian akan meningkat.

Semakin tinggi nilai PAD dan belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan

pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan pendapatan maka semakin rendah tingkat kemiskinan hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya PAD dan Belanja modal yang dapat digunakan untuk menambah anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan.

Ha<sub>1</sub>: Kinerja Keuangan berupa (rasio kemandirian, rasio efektifitas, pertumbuhan pendapatan) berpengaruh negatif pada Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Bali

Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan tingkat pendapatan daerah semakin tinggi, dengan pendapatan daerah yang tinggi dapat digunakan untuk menambah alokasi belanja modal yang mana belanja modal digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah asset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Ha<sub>2</sub>: Kinerja Keuangan berupa rasio efisiensi berpengaruh positif pada Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Bali.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Wongdesimiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Ha<sub>3</sub>: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan pada tingkat kemiskinan. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Ha<sub>4</sub>: Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan berupa (rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan pendapatan pada Tingkat Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini berbentuk asosiatif. Lokasi dari penelitian ini yaitu Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Obyek yang diteliti pada

penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dinas atau instansi yang terkait, yaitu Bagian Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Bali serta situs-situs Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan, beberapa laporan realisasi anggaran, data mengenai PDRB, dan data mengenai tingkat kemiskinan tahun 2009-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah 8 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bali dari tahun 2009-2013. Sampel dalam penelitian ini adalah 8 kabupaten dan 1 Ibukota di Provinsi Bali dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi *non partisipan*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji asumsi klasik, perumusan model *Moderated Regression Analysis (MRA)*, koefisien determinasi, uji kesesuaian model (uji F), uji t, dan uji hipotesis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan data *time series*, yang diperoleh dari data keuangan dan data tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang periode 2009 sampai dengan tahun 2013. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 9 kabupaten/kota x 5 tahun = 45 amatan. Berdasarkan 45 data

penelitian, berikut adalah hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Hasil uji pada Tabel 1 menunjukkan nilai Asymp.Sig (2-tailed) dari uji normalitas adalah sebesar 0,858 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti model dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		45
Normal. Parameters a,b	Mean	0.000000
	Std. Deviation	1.05570253
Most Extreme Differenc	Absolute	0.090
	Positive	0.090
	Negative	-0.061
Kolmogrov-Smirnov Z		0.605
Asymp. Sig (2-tailed)		0.858

Sumber: Data Diolah, 2015

Tabel 2 Hasil pengujian multikolinearitas untuk semua variabel independen memiliki tolerance lebih besar dari 10 persen (0,1) dan VIF kurang dari sehingga tidak ada indikasi terjadinya gejala multikolinearitas.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Rasio Kemandirian	0,704	1,421	Tidak terjadi multikoliniearitas
2	Rasio Efisiensi	0,923	1,083	Tidak terjadi multikoliniearitas
3	Rasio Efektivitas	0,788	1,269	Tidak terjadi multikoliniearitas
4	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	0,652	1,535	Tidak terjadi multikoliniearitas
5	Pertumbuhan Ekonomi	0,490	2,042	Tidak terjadi multikoliniearitas

Sumber: Data Diolah, 2015

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 3 menunjukkan nilai D-W sebesar 1,951 dengan nilai  $d_L = 1,29$  dan  $d_U = 1,78$  sehingga  $4 - d_L = 4 - 1,29 = 2,71$  dan  $4 - d_U = 4 -$

1,78 = 2,22 . Oleh karena nilai *d statistic* 1,951 berada diantara  $d_U$  dan  $4-d_U$  ( $1,78 < 1,951 < 2,22$ ) maka pengujian dengan Durbin-Watson berada pada daerah tidak ada autokorelasi maka ini berarti pada model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,705	0,497	0,432	1,12134	1,951

*Sumber:* Data Diolah, 2015

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

No.	Variabel	Sig.	Keterangan
1	Rasio Kemandirian	0,898	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	Rasio Efisiensi	0,428	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Rasio Efektivitas	0,585	Tidak terjadi heteroskedastisitas
4	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	0,144	Tidak terjadi heteroskedastisitas
5	Pertumbuhan Ekonomi	0,103	Tidak terjadi heteroskedastisitas

*Sumber:* Data Diolah, 2015

Hasil uji glejser pada penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini telah terbebas dari indikasi heteroskedastisitas karena tidak ada satupun nilai *absolute residual* variabel bebas yang berpengaruh signifikan ( $>0,05$ ) terhadap variabel terikat. Hasil keseluruhan uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil uji F atau uji kelayakan model menunjukkan pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis. Apabila uji F menunjukkan hasil yang signifikan, maka seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan model yang digunakan layak uji, sehingga pengujian hipotesis dapat dilanjutkan.

Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai sig.  $F_{hitung} = 0,000 < \alpha = 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian. Ini berarti variabel independen yang terdiri atas rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Kesesuaian Model (Uji F)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	48.375	5	9.675	7.694	0.000 <sup>a</sup>
Residual	49.038	39	1.257		
Total	97.413	44			

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 43,2% yang berarti bahwa 43,2% variasi perubahan Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel Kinerja Keuangan berupa Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan variabel pemoderasinya Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 56,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted  $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.705 <sup>a</sup>	0.497	0.432

Sumber: Data Diolah, 2015

Dari Tabel 7 dapat dipetakan rata-rata tingkat kemiskinan, tingkat rasio dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, sebagai berikut:

Rata-rata (*Mean*) digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data dan standar deviasi digunakan untuk mengukur perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya.

**Tabel 7.**  
**Statistik Deskripsi**

Variabel	<i>Mean</i> (%)	Min (%)	Max (%)	Std Deviasi (%)
Rasio Kemandirian	59,62	4,70	500,99	108,47
Rasio Efisiensi	96,72	9,39	132,30	15,07
Rasio Efektivitas	110,76	51,57	130,07	12,08
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	13,65	-4,74	41,61	8,51
Pertumbuhan Ekonomi	5,95	4,57	7,30	0,63
Tingkat Kemiskinan	5,23	2,08	7,88	1,48

*Sumber:* Data Diolah, 2015

Tabel 7 menunjukkan bahwa *Mean* variabel rasio kemandirian sebesar 59,62% dengan standar deviasi sebesar 108,47%. Hal ini berarti rata-rata tingkat kemandirian daerah tergolong sedang (>50-75%) dengan pola hubungan partisipatif dimana peran pemerintah pusat sudah sangat berkurang karena tingkat kemandirian daerah sudah mampu melaksanakan otonomi daerah. Rasio Kemandirian pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali per tahun yang terendah sebesar 4.70% dimiliki oleh kabupaten Bangli pada tahun 2010 hingga yang tertinggi sebesar 500.99% dimiliki oleh kabupaten Badung pada tahun 2011.

*Mean* variabel rasio efisiensi sebesar 96,72% dengan standar deviasi sebesar 15,07%. Hal ini berarti rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah tergolong kurang efisien (90-100%) yang mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan belum memenuhi dari apa yang direncanakan. Rasio Efisiensi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali per tahun yang terendah sebesar 9.39% dimiliki oleh kabupaten Bangli pada tahun

2009 hingga yang tertinggi sebesar 132.30% dimiliki oleh kabupaten Jembrana pada tahun 2009.

*Mean* variabel rasio efektivitas sebesar 110,76 dengan standar deviasi sebesar 12,08%. Hal ini berarti rata-rata tingkat efektivitas keuangan daerah tergolong sangat efektif (>100%) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah sangat baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Besar kecilnya relisasi yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten tergantung dari cara pemanfaatan potensi yang terdapat pada masing-masing kabupaten. Rasio Efektivitas pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali per tahun yang terendah sebesar 51.57% dimiliki oleh kabupaten Karangasem pada tahun 2010, hingga yang tertinggi sebesar 130.07% sedangkan nilai maksimum rasio efektivitas dimiliki oleh kota Denpasar pada tahun 2011.

*Mean* variabel rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 13,65 dengan standar deviasi sebesar 8,51. Hal ini berarti pendapatan yang dihasilkan dari tahun ketahun tidak terlalu tinggi. Rasio Pertumbuhan Pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali per tahun yang terendah sebesar -4.74% dimiliki oleh kabupaten Bangli pada tahun 2009, hingga yang tertinggi sebesar 41.61% dimiliki oleh kabupaten Badung pada tahun 2012.

*Mean* variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95% dengan standar deviasi sebesar 0,63%. Hal ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali per tahun yang terendah 4.57% dimiliki oleh

kabupaten Jembrana pada tahun 2010, hingga yang tertinggi sebesar 7.30% dimiliki oleh kabupaten Badung pada tahun 2012.

*Mean* variabel tingkat kemiskinan sebesar 5,23% dengan standar deviasi sebesar 1,48%. Hal menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali masih pada tingkat yang rendah. Tingkat kemiskinan pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Bali per tahun dari yang terendah 2.08% dimiliki oleh kota Denpasar pada tahun 2013, hingga tertinggi 7.88% dimiliki oleh kabupaten Gianyar pada tahun 2010.

Rangkuman hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 8 Pengujian tersebut dilakukan terhadap variabel rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang ditunjukkan pada Tabel 7, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 14,457 - 1,041 X_5 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 14,457 menunjukkan bahwa jika variabel rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi sama dengan nol, maka nilai tingkat kemiskinan (Y) adalah sebesar 14,457 persen. Nilai koefisien  $\beta_5 = -1,041$  menunjukkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat satu persen, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar -1,041 persen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

**Tabel 8.**  
**Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

No.	Model Variabel	Unstandardized Coefficients			Sig.	Hasil Uji Hipotesis
		B	Std. Error			
1	Rasio Kemandirian	-0,004	0,002	0,027	Diterima	
2	Rasio Efisiensi	-0,004	0,012	0,704	Ditolak	
3	Rasio Efektivitas	-0,022	0,016	0,166	Ditolak	
4	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	0,010	0,025	0,688	Ditolak	
5	Pertumbuhan Ekonomi	-1,041	0,381	0,009	Diterima	
	Konstanta =		14,457			

Sumber: Data Diolah, 2015

Hasil uji t pada Tabel 8 menunjukkan pengaruh variabel rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi pada tingkat kemiskinan secara parsial. Pengujian masing-masing variabel bebas pada variabel terikat dijelaskan sebagai berikut.

Hipotesis pertama ( $H_{a1}$ ) menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Untuk menguji pengaruh rasio kemandirian pada tingkat kemiskinan dapat dilihat pada hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) t variabel rasio kemandirian =  $0,027 < \alpha = 0,005$  dengan nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar (-0,004). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a1}$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Kesimpulannya adalah rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Hipotesis kedua ( $H_{a2}$ ) menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif pada tingkat kemiskinan. Untuk menguji pengaruh rasio efisiensi pada tingkat kemiskinan dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) t variabel rasio efisiensi =  $0,704 > \alpha = 0,005$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a2}$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Kesimpulannya adalah rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Hipotesis ketiga ( $H_{a3}$ ) menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Untuk menguji pengaruh rasio efektivitas pada tingkat kemiskinan dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) t variabel rasio efektivitas =  $0,166 > \alpha = 0,005$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a3}$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Kesimpulannya adalah rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Hipotesis keempat ( $H_{a4}$ ) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Untuk menguji pengaruh rasio pertumbuhan pendapatan pada tingkat kemiskinan dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) t variabel rasio pertumbuhan pendapatan =  $0,688 > \alpha = 0,005$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a4}$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Kesimpulannya adalah rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Hipotesis kelima ( $H_{a5}$ ) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi pada tingkat kemiskinan dilakukan dengan melihat hasil uji statistik t. Tingkat probabilitas (sig.) t variabel pertumbuhan ekonomi =  $0,009 < \alpha = 0,005$  dan nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi bernilai negatif sebesar (1,041). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a5}$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Kesimpulannya adalah rasio pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Untuk mengetahui apakah variabel pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh variabel rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas

serta rasio pertumbuhan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan maka digunakan model pengujian interaksi (*Moderated Regression Analysis—MRA*). Model ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel moderasi mampu mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel bebas). Adapun hasil analisis uji interaksi dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9.**  
**Rangkuman Hasil Uji Interaksi (*Moderated Regression Analysis*)**

No.	Model Variabel	Unstandardized Coefficients		Sig.	Hasil Uji Hipotesis
		B	Std. Error		
1	Rasio Kemandirian	-0,057	0,067	0,398	Ditolak
2	Rasio Efisiensi	0,257	0,249	0,309	Ditolak
3	Rasio Efektivitas	0,116	0,142	0,419	Ditolak
4	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	0,432	0,337	0,209	Ditolak
5	Pertumbuhan Ekonomi	7,177	5,615	0,210	Ditolak
6	Interaksi X1X5	0,008	0,010	0,442	Ditolak
7	Interaksi X2X5	-0,046	0,044	0,301	Ditolak
8	Interaksi X3X5	-0,025	0,026	0,342	Ditolak
9	Interaksi X4X5	-0,070	0,058	0,229	Ditolak
	Konstanta =			-31,573	
	Sig. F			0,000	
	Adjusted R Square			0,428	

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa hasil uji interaksi (*Moderated Regression Analysis—MRA*) menunjukkan setelah pertumbuhan ekonomi masuk sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa keseluruhan nilai signifikansi baik masing-masing variabel bebas secara parsial serta nilai signifikansi variabel interaksi menunjukkan hasil lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ , Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas serta rasio pertumbuhan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi

berhubungan dengan variabel tingkat kemiskinan dan atau kinerja keuangan tetapi variabel pertumbuhan ekonomi tidak berinteraksi dengan variabel tingkat kemiskinan, maka variabel pertumbuhan ekonomi bukanlah pemoderasi melainkan hanya sebagai variabel prediktor atau variabel independen (Ghozali, 2011).

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui  $H_{a1}$  diterima, dimana Rasio Kemandirian Berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Ini berarti semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang mana hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini mendukung penelitian oleh Putri Ani (2012) menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan.

Halim, (2002) menyatakan, semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (pemerintah pusat dan provinsi).

Rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini menolak  $H_{a2}$  dimana Rasio Efisiensi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Mendukung penelitian oleh Putri Ani (2012) menunjukkan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hal ini dimungkinkan disebabkan oleh kondisi keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali masih kurang efisien, yang berarti belanja daerah masih

tinggi di bandingkan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah yang tinggi di Kabupaten dan Kota di Bali tidak dapat berpengaruh terhadap kemiskinan di karenakan jika dilihat dari alokasi belanja masih di dominasi oleh belanja pegawai, di mana belanja pegawai merupakan belanja yang berada pada pos Belanja Tidak Langsung.

Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini menolak Ha3 dimana rasio efektivitas berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri Ani (2012) yang menemukan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah pembuatan keputusan untuk pembuatan tarif pelayanan publik. Pembuatan keputusan tersebut harus mempertimbangkan faktor internal yang mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pelayanan publik dan faktor eksternal yang mempertimbangkan ekonomi sosial dan politik. Faktor ekonomi yang dipertimbangkan harus mengetahui seberapa besar kemampuan masyarakat untuk membayar dan dampaknya terhadap perekonomian, dengan begitu maka meski efektivitas PAD yang semakin meningkat belum tentu bisa menyebabkan penurunan kemiskinan di daerah, sehingga pemerintah harus ekstra berhati-hati dalam memberikan keputusan terkait dengan PAD terutama pada pajak dan retribusi daerah.

Hal lain yang memungkinkan hal ini karena adanya pemberian insentif sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya insentif memungkinkan instansi pemerintah untuk melonggarkan target pendapatan asli daerah sehingga target dapat tercapai. Dengan target PAD yang kecil realisasi PAD tidak dapat dioptimalkan untuk menambah anggaran program-program untuk menanggulangi kemiskinan.

Rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini menolak  $H_{a4}$  dimana rasio pertumbuhan pendapatan berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri Ani (2012) yang menemukan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena penerimaan daerah dari tahun ke tahun tidak terlalu tinggi, sehingga kurang mampu mendorong pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk mengembangkan program-program dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Hasil ini menerima  $H_{a5}$  dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil uji interaksi (*Moderated Regression Analysis—MRA*) variabel pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas serta rasio pertumbuhan pendapatan

terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel moderasi melainkan hanya sebagai variabel bebas. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk dapat memoderasi kinerja keuangan pada tingkat kemiskinan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan Kinerja keuangan (rasio kemandirian) Berpengaruh negatif signifikan pada tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Kinerja keuangan (rasio efisiensi, rasio efektivitas) tidak berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh positif pada tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan pada tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas serta rasio pertumbuhan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan variabel moderasi melainkan hanya sebagai variabel bebas (predictor).

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat direkomendasikan adalah pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan pajak dan retribusi daerah agar dapat meningkatkan rasio kemandirian dengan mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal (pemerintah Pusat/Provinsi), sehingga tingkat kemiskinan dapat diatasi. Selain itu pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik. Peneliti juga sebaiknya menggunakan periode penelitian berbeda serta memperluas lokasi penelitian tidak hanya pada Kabupaten dan Kota Provinsi Bali.

## REFERENSI

- Akai, N. and Sakata, M. 2002. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence form State-Level Cross-Section Data for the United States*. *Journal of Urban Economics*, vol.52, pp: 93-108.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah).*Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Aristovnik, A. 2012. *Fiscal decentralization in Eastern Europe: a twenty-year perspective*. MPRA Paper No. 39316, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia.
- Arze del Granado, F. Javier and Jorge Martinez-Vazquez and Robert M. McNab. 2012. *Decentralized Governance and Preferences for Public Goods*. *Georgia State University, Naval Postgraduate School*.
- Boadiwaa, A. 2007. *The Effects of Fiscal Decentralization on Economic Growth in U.S. Counties*. *The Ohio State University*.
- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach*. *MRG@UQ Discussion Paper*, School of Economics, University of Queensland.
- Cahyat, Ade. 2004. *Bagaimana Kemiskinan di Ukur: Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: *Center for International Forestry Research (CIFOR)*.
- Darwanto dan Yustikasari. 2006. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Kasus Kabupaten /Kota se-Jawa Bali tahun 2004-2005.

- Faridi, Muhammad Zahir. 2011. *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS) Vol. 31, No. 1 (June 2011), pp. 1-1.*
- Fidelius. 2013. Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan keuangan daerah Kota Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. Mando.
- Florida, Asha. 2006. Pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara. *Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara.*
- Govinda Rao, M. 2003. *Fiscal Decentralization In China And India: A Comparative Perpspective. Asia-Pacific Development Journal. Vol. 10, No. 1, June 2003.*
- Graff, Michael. 1999. Financial Development and Economic Growth – A New Empirical Analysis. *Dresden Discussion Papers in Economics No. 5/99.ETH Zurich.*
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi. 2007. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur periode 2001-2006).
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X.*
- Irawan, Arief Wahyu. 2013. Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan (studi kasus pada seluruh kabupaten se Jawa Tengah periode 2007-2009). Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Jalil, Abdula dan Ma Ying. 2008. Financial Developmen, Economic Growth and Adaptive Efficiency: A Comparison Between China and Pakistan. *China & World Economy, 16(6): h: 97-111, November-December 2008.*
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial*

*Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from:  
<http://papers.ssrn.com>

John Bohte and Kenneth J. Meier. 2000. *"The Marble Cake: Introducing Federalism to the Government Growth Equation."* Publius: The Journal of Federalism.

Kristanto, Didin. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Dilihat Dari Pendapatan Daerah Pada APBD 2010-2012. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Liliana, Bunescu, Mihaiu Diana and Comaniciu Carmen. 2011. *Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenues?. International Journal of Arts & Sciences*, pp: 241-254.

Manik, Tumpal 2013. Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, inflasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Mulyono. 2012. *The Impact of fiscal Decentralization on Regional Economic Development in Indonesia For the Periods 2005-2008. Ritsumeikan Asia Pasific University, International Cooperation Policy.*

Natalia Dewi, Cokorda Istri. 2007. Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money Untuk Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2002-2006. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.*

Putri Ani. 2012 . Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali.

Seftarita, Chenny. 2005. Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Simposium Riset Ekonomi II*. Surabaya.

Setyanda, Hanika. Analisis Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Pendekatan analisis jalur (Studi pada Kab/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta). Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.

Stewart, Frances, Gustav Ranis, Michael Boozer, Tavneet Suri. 2003. Paths to success: the relationship between Human development and economic growth. *Center discussion paper no. 874*. Yale University.